



## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Siak dapat menyusun Laporan Kinerja Pemerintah (LKP) Tahun 2017.

Laporan ini disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, sebagai pengganti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja dan Pelaporan Kinerja Tahunan. Laporan Kinerja Pemerintah (LKP) Tahun 2017 ini sebagai gambaran Capaian Kinerja SKPD yang bersifat taktis dan strategis, serta mengacu pada visi dan misi strategis.

Laporan Kinerja Pemerintah (LKP) mempunyai beberapa fungsi, antara lain merupakan alat penilain kinerja secara kuantitatif, sebagai wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Siak menuju terwujudnya *good governance*, dan sebagai wujud transparansi serta pertanggungjawaban. Disisi lain Laporan Kinerja Pemerintah (LKP) ini merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Siak.



*Laporan Kinerja Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik  
Tahun 2017*

---

Kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah (LKP) ini kami ucapkan terima kasih. Kritik dan saran untuk perbaikan laporan ini dimasa yang akan datang sangat kami hargai. Semoga laporan ini dapat bermanfaat dan dapat dijadikan tolak ukur untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2017

Siak Sri Indrapura,

**KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA  
DAN POLITIK KABUPATEN SIAK**



**HASMIZAL, S.Sos**

**NIP. 19650418 198603 1 006**



## RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Pemerintah (LKP) Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Siak Tahun 2017, merupakan wujud dari pertanggung jawaban atas kinerja yang dilaksanakan, juga sebagai alat kendali dan alat penilai kinerja secara kuantitatif dan perwujudan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD menuju terwujudnya *good governance* yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggung jawabkan. Laporan Kinerja Pemerintah (LKP) juga merupakan alat untuk memacu peningkatan kinerja dan pelayanan kepada *stakeholders* pada setiap unit di lingkungan Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Siak .

### Visi :

*“Terwujudnya masyarakat Kabupaten Siak yang bersatu, harmonis, demokratis, partisipatif dan terciptanya suasana yang aman dan nyaman dalam lingkungan masyarakat yang agamis dan berbudaya melayu.”*

Selanjutnya dalam rangka mencapai visi di atas, Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Siak menetapkan **3 (tiga) misi**, yaitu :

1. Mewujudkan persatuan dan kesatuan masyarakat;
2. Mewujudkan masyarakat yang demokratis dan partisipatif;
3. Mewujudkan situasi ketentraman dan ketertiban masyarakat yang kondusif.



Misi tersebut selanjutnya dirinci dalam Rencana Strategi (Renstra) Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Siak Tahun 2016 - 2021 yang digunakan sebagai landasan penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT). Rencana Kinerja Tahunan (RKT) berfungsi sebagai rencana kerja operasional secara kuantitatif, yang pada intinya merupakan implementasi pelaksanaan tugas yang sangat strategis dalam bidang pengelolaan keuangan dan kekayaan negara, mulai dari penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), melaksanakan APBD dengan menghimpun penerimaan dan menyalurkan dana APBD, dan akhirnya mempertanggung jawabkan melalui DPRD Kabupaten Siak.

Dalam situasi dan kondisi perekonomian yang sangat fluktuatif, serta tuntutan masyarakat yang sangat dinamis, tugas pengelolaan keuangan dan Kekayaan Negara dirasakan semakin berat dan penuh tantangan. Walaupun demikian, dengan dimotivasi oleh visi dan misi yang telah ditetapkan, secara umum aparatur Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Siak telah berhasil mengatasinya, sehingga tugas yang diemban dapat diselesaikan sesuai dengan harapan.

Berdasarkan Perda Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Siak. Tugas pokok Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Siak adalah membantu Bupati dalam menyelenggarakan sebagian urusan Pemerintah Daerah antara lain sebagai berikut :

#### **A. Tugas**

- a. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas pokok memberikan dukungan kepada Kepala Daerah dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik.
- b. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat satu :



- Perumusan kebijakan teknis dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
- Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
- Pembinaan pelaksanaan tugas di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
- Pelaksanaan urusan Tata Usaha Kantor;
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **B. Fungsi**

Dalam melaksanakan tugas pokok, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupten Siak memiliki fungsi yaitu:

- a) Pelaksanaan perencanaan program, pembinaan, dan kebijakan teknis sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan yang telah ditetapkan;
- b) Memfasilitasi kegiatan partai politik, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, dan membantu melaksanakan kegiatan PEMILU dan pendidikan politik;
- c) Pengumpulan data-data keamanan dan ketertiban masyarakat, organisasi masyarakat (ORMAS), lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan partai politik;
- d) Meningkatnya ketahanan ekonomi, seni, budaya, agama, dan kemasyarakatan dalam menunjang ketahanan bangsa;
- e) Meningkatnya kapasitas LSM/Orkemas, FPK, FKDM dan FKUB dalam menunjang pembangunan daerah;
- f) Melaksanakan pemantauan dan mengadakan monitoring tentang situasi keamanan dan ketertiban.



Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik telah merumuskan tujuan dan saran strategis yang merupakan bagian internal dalam proses rencana strategis organisasi untuk mencapai visi dan merealisasikan misi. Adapun target dan sasaran strategis tahun 2017 yang akan dicapai oleh Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik adalah sebagai berikut :

**Tujuan :**

Mewujudkan Stabilitas Kesatuan Bangsa dan Politik di Kabupaten Siak

**Sasaran :**

- A. Meningkatnya Pelayanan dan Kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
- B. Meningkatnya Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan;
- C. Meningkatnya Pemahaman dan Sikap Masyarakat Terhadap Nilai-Nilai Wawasan Kebangsaan;
- D. Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Menggunakan Hak Politik.

Dalam rangka menunjang pencapaian tujuan strategis tersebut disusunlah sasaran strategis Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Siak yang pada hakekatnya merupakan pilar - pilar reformasi birokrasi Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Siak yang mewujudkan persatuan dan kesatuan masyarakat, masyarakat yang demokratis dan partisipatif dan situasi ketentraman dan ketertiban masyarakat yang kondusif Sasaran strategis tersebut diimplementasikan.

Penilaian terhadap keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan pencapaian sasaran yang ditetapkan, diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU). Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, Kabupaten Siak telah melakukan perubahan mendasar pada tata kelola pemerintahan. Reformasi birokrasi yang dilandasi oleh prinsip-prinsip *good and clean governance* untuk melahirkan aparatur pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel,



*Laporan Kinerja Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik  
Tahun 2017*

---

terus bergulir reformasi gelombang pertama, utamanya dalam lima tahun terakhir telah memajukan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.